



# Distribusi Kekuasaan di Lingkungan Anggota Dewan: Analisis Kajian Literatur Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Politik

Umi Atin Nuraeni\*, Tika Ayu Pratiwi, Mohammad Afrizal, Windra Zaenal Sidiq, Didik Tri Setiyoko

Universitas Muhadi Setiabudi

**Abstrak:** Penelitian ini membahas bagaimana kekuasaan terdistribusi di lingkungan anggota dewan dan bagaimana distribusi tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kajian dilakukan melalui analisis literatur dari berbagai penelitian dan buku terbaru terkait dinamika kekuasaan, politik, kepemimpinan kolejial, dan peran kelompok pengaruh. Hasil kajian menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan tidak pernah sepenuhnya merata. Faktor yang membentuknya meliputi posisi formal, jaringan politik, kepemimpinan, serta kemampuan anggota membangun pengaruh. Dalam proses keputusan politik, kekuasaan berperan melalui tiga mekanisme: membentuk agenda, menegosiasikan kepentingan, dan membangun koalisi. Literatur juga menekankan pentingnya etika politik dan tanggung jawab sosial agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa distribusi kekuasaan di lembaga legislatif merupakan hasil interaksi antara struktur formal dan dinamika informal, yang bersama-sama menentukan kualitas keputusan politik.

**Kata kunci:** Distribusi Kekuasaan, Anggota Dewan, Keputusan Politik, Kelompok Pengaruh, Kepemimpinan, Literatur Politik

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3628>

\*Correspondence: Umi Atin Nuraeni

Email: [umiattinnuraini@gmail.com](mailto:umiattinnuraini@gmail.com)

Received: 08-04-2026

Accepted: 08-05-2026

Published: 08-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *his study examines how power is distributed among council members and how such distribution shapes political decision-making. The analysis relies on recent literature discussing power relations, political behavior, collegial leadership, and the role of influence groups. The findings indicate that power is never evenly distributed. Its formation is influenced by formal positions, political networks, leadership roles, and the ability to build influence. In decision-making processes, power operates through three mechanisms: agenda setting, interest negotiation, and coalition building. The reviewed literature also use highlights the importance of political ethics and social responsibility to prevent misuse of power. This study concludes that power distribution within legislative bodies emerges from the interaction of formal structures and informal dynamics, both of which shape the quality of political decisions.*

**Keywords:** *Power Distribution, Council Members, Political Decisions, Influence Groups, Leadership, Political Literatur.*

## Pendahuluan

Distribusi kekuasaan di lingkungan anggota dewan selalu menjadi perhatian dalam studi politik karena menentukan arah kebijakan publik. Dalam lembaga legislatif, kekuasaan tidak hanya diatur oleh struktur formal, tetapi juga oleh hubungan informal, jaringan politik, serta kepentingan kelompok yang terlibat dalam setiap proses legislasi. Situasi ini membuat proses pengambilan keputusan politik sering kali bersifat kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dipahami hanya dari aturan tertulis.

Perkembangan penelitian tentang kekuasaan menunjukkan bahwa dinamika internal lembaga politik memengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan. Savirani dan rekan-rekan (2025) menjelaskan bahwa kekuasaan terbentuk melalui interaksi antaraktor, baik yang memiliki posisi formal maupun yang memiliki pengaruh informal. Situasi ini memperlihatkan bahwa kewenangan anggota dewan tidak bisa dipahami hanya dari jabatan, tetapi juga dari kemampuan mereka membangun relasi dan dukungan politik.

Pembahasan mengenai peran kekuasaan dalam organisasi juga dijelaskan oleh Andriyani et al. (2025). Mereka menemukan bahwa kekuasaan memengaruhi kinerja dan efektivitas lembaga. Temuan ini relevan untuk memahami kerja anggota dewan, karena keputusan politik sering dipengaruhi oleh nilai tawar masing-masing anggota dan kelompok. Dengan kata lain, keputusan tidak lahir dari proses yang netral, melainkan dari pertimbangan kekuasaan yang saling bersinggungan.

Studi terkait kelompok pengaruh yang dilakukan Sinaga (2024) menegaskan bahwa keputusan politik sering dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan. Kelompok ini dapat berupa fraksi, jaringan politik, atau tokoh yang dihormati dalam lingkungan dewan. Pengaruh tersebut muncul melalui tiga cara: membentuk preferensi anggota, membatasi pilihan politik, dan mengarahkan negosiasi selama pembahasan kebijakan.

Selain itu, konteks etika politik ikut berperan dalam mengarahkan distribusi kekuasaan. Nurdiarti dan Nastain (2021) menjelaskan bahwa anggota dewan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan publik. Etika politik membantu membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan pengaruh di antara anggota. Hal ini penting karena distribusi kekuasaan yang tidak proporsional dapat menurunkan kualitas kebijakan.

Dalam konteks kelembagaan formal, Tarigan (2024) menguraikan bahwa sistem ketatanegaraan memberikan struktur dasar pembagian kewenangan. Namun struktur tersebut tidak otomatis menciptakan pemerataan kekuasaan. Deni et al. (2024) juga menekankan bahwa politik berjalan melalui interaksi antaraktor yang membawa kepentingan berbeda. Karena itu, struktur formal dan dinamika informal selalu berjalan bersamaan ketika dewan menetapkan sebuah keputusan.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana kekuasaan terdistribusi di antara anggota dewan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi proses keputusan politik. Pemahaman ini diperlukan agar mekanisme legislasi bisa lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian berbasis kajian literatur membantu memberikan gambaran teoritis yang lebih menyeluruh mengenai hubungan kekuasaan dan proses politik.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola distribusi kekuasaan di lingkungan anggota dewan dan menjelaskan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan politik. Manfaat yang diharapkan mencakup tiga hal. Pertama, memberikan pemahaman teoritis bagi peneliti dan akademisi. Kedua, memberi masukan bagi lembaga legislatif dalam memperbaiki mekanisme kerja internal. Ketiga, membantu masyarakat memahami bagaimana keputusan politik terbentuk sehingga dapat meningkatkan pengawasan publik terhadap kinerja dewan.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian berfokus pada pemahaman konsep dan pola yang muncul dalam dinamika distribusi kekuasaan di lingkungan anggota dewan. Kajian literatur memberikan ruang untuk membandingkan berbagai temuan dan pandangan teoretis dari penelitian sebelumnya, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara kekuasaan dan proses pengambilan keputusan politik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen ilmiah yang membahas kekuasaan, politik, kepemimpinan, kelompok pengaruh, dan proses legislasi. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel seperti penelitian lapangan, tetapi memilih sumber berdasarkan kriteria relevansi, keterbaruan, dan kontribusi terhadap pemahaman topik. Tahap pemilihan sumber dilakukan dengan langkah berikut: (1) mengidentifikasi tema utama yang berkaitan dengan kekuasaan dan keputusan politik; (2) menyeleksi literatur yang sesuai; dan (3) mengelompokkan sumber berdasarkan fokus kajiannya.

Analisis data dilakukan melalui proses membaca, merangkum, dan menginterpretasi isi literatur. Analisis dibagi ke dalam beberapa tahap. Pertama, menemukan konsep kunci seperti struktur kekuasaan, mekanisme pengaruh, dan peran institusi. Kedua, membandingkan pandangan antarpenulis untuk menemukan pola atau perbedaan. Ketiga, menyusun temuan ke dalam kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil analisis kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan mengenai distribusi kekuasaan dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan politik.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan di lingkungan anggota dewan tidak pernah bersifat merata. Kekuasaan tersebar melalui dua jalur utama yaitu struktur formal lembaga dan hubungan informal antaranggota. Struktur formal memberi kewenangan kepada pimpinan dewan, ketua fraksi, dan ketua komisi, sementara hubungan informal mencakup jaringan politik, kedekatan ideologis, dan jejaring personal. Temuan ini sejalan dengan kajian Savirani et al. (2025) yang menegaskan bahwa kekuasaan terbentuk dari kombinasi kedudukan formal dan kapasitas aktor dalam membangun pengaruh sosial-politik.

Dalam struktur formal, posisi jabatan memainkan peran penting dalam menentukan kekuatan anggota. Pimpinan dewan memiliki otoritas lebih besar untuk mengatur agenda pembahasan, menetapkan prioritas kebijakan, dan mengoordinasikan rapat. Namun kajian literatur memperlihatkan bahwa jabatan formal tidak selalu menjamin dominasi penuh. Anggota yang memiliki pengaruh kuat di fraksi atau dukungan kelompok politik eksternal dapat menyaingi kewenangan struktural tersebut. Hal ini mendukung pandangan Deni et al. (2024) yang menegaskan bahwa proses politik selalu dipengaruhi oleh relasi informal yang melibatkan kepentingan individu maupun kelompok.

Distribusi kekuasaan juga terlihat pada mekanisme pembentukan agenda politik. Agenda tidak semata lahir dari kebutuhan publik, melainkan dari kompetisi antaranggota dan antarfraksi dalam menentukan isu yang dianggap strategis. Anggota yang memiliki

akses ke pimpinan fraksi memiliki posisi tawar lebih besar untuk memasukkan kepentingan mereka ke dalam agenda. Sinaga (2024) menjelaskan bahwa kelompok pengaruh berperan dalam tahap ini, terutama melalui upaya membatasi atau membuka ruang bagi isu tertentu untuk dibahas.

Temuan lain menunjukkan bahwa kekuasaan sering muncul melalui kemampuan anggota membangun jaringan politik. Jaringan ini dapat berupa hubungan dengan partai, organisasi masyarakat, atau tokoh penting di daerah pemilihan. Anggota yang memiliki jaringan luas cenderung memperoleh dukungan lebih besar saat proses negosiasi berlangsung. Andriyani et al. (2025) menyatakan bahwa kekuasaan meningkatkan kinerja organisasi, dan dalam konteks dewan, peningkatan tersebut terwujud melalui kemampuan anggota mengoordinasikan dukungan serta memastikan keberlanjutan program politik mereka.

Dalam pembahasan kebijakan, negosiasi menjadi titik penting yang menggambarkan distribusi kekuasaan. Kajian literatur menunjukkan bahwa negosiasi tidak selalu berlangsung terbuka dan rasional. Banyak keputusan dibentuk melalui kesepakatan informal yang terjadi di luar rapat resmi. Temuan ini konsisten dengan Ahkami et al. (2025) yang menyoroti peran kekuasaan dalam mengelola konflik serta pertukaran kepentingan di organisasi pendidikan. Analogi ini dapat diterapkan pada lembaga negara, terutama karena keduanya sama-sama mengandalkan proses kolektif dalam pengambilan keputusan.

Kepemimpinan kolegial berpengaruh besar dalam mengarahkan distribusi kekuasaan. Studi Wathoni (2024) mengenai KPU Ngawi menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dalam sistem kolegial dapat meningkatkan kualitas keputusan. Dalam konteks dewan, kepemimpinan kolegial memungkinkan anggota terlibat dalam diskusi yang lebih terbuka, meskipun distribusi kekuasaan tetap tidak sepenuhnya setara. Kajian literatur memperlihatkan bahwa pemimpin yang inklusif dapat mengurangi dominasi kelompok tertentu dan memperbesar peluang anggota yang kurang berpengaruh untuk menyuarakan pendapat.

Selain faktor internal, distribusi kekuasaan juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang berasal dari pemilih, media, serta pemangku kepentingan lain. Tekanan ini dapat memperkuat atau melemahkan posisi anggota di dalam dewan. Anggota yang mendapat dukungan publik cenderung memiliki pengaruh lebih besar ketika isu yang mereka usulkan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mendukung temuan Nurdiarti dan Nastain (2021) yang menekankan bahwa tanggung jawab sosial politik menjadi bagian penting dalam menjaga legitimasi anggota dewan.

Permasalahan muncul ketika distribusi kekuasaan menjadi terlalu timpang. Literatur menunjukkan bahwa ketimpangan dapat memunculkan dominasi berlebihan dari kelompok tertentu dan menurunkan kualitas kebijakan. Ketimpangan juga menghambat anggota lain untuk terlibat aktif dalam proses legislasi. Tarigan (2024) menekankan bahwa meskipun konstitusi telah mengatur pembagian kewenangan, praktik politik sering kali menunjukkan bahwa aktor kuat dapat memanfaatkan celah institusional untuk memperluas pengaruh mereka.

Temuan lain mengungkap bahwa proses pembentukan koalisi merupakan salah satu arena yang paling mencerminkan distribusi kekuasaan. Koalisi tidak hanya dibentuk untuk memenangkan suara, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman bagi anggota dalam memperjuangkan kepentingan tertentu. Koalisi biasanya dipimpin oleh anggota yang memiliki pengaruh besar, baik dari segi pengalaman politik maupun kedekatan dengan pimpinan partai. Literatur politik seperti karya Alim (2024) mendukung temuan ini dengan menjelaskan bahwa kebijakan publik lahir dari proses tawar-menawar yang melibatkan berbagai pihak dengan kekuatan berbeda.

Dalam beberapa kasus, distribusi kekuasaan juga dipengaruhi oleh kemampuan anggota dalam mengelola arus informasi. Anggota yang memiliki akses pada informasi strategis cenderung lebih unggul dalam memengaruhi keputusan. Mereka dapat menentukan waktu, arah, dan bentuk isu yang akan diperdebatkan. Situasi ini menguatkan pandangan bahwa kekuasaan tidak hanya berasal dari jabatan tetapi juga dari sumber daya non-struktural seperti informasi, opini publik, dan jaringan politik.

Analisis literatur menunjukkan bahwa mekanisme pengaruh berjalan melalui tiga proses utama yaitu pembentukan agenda, negosiasi kepentingan, dan pembentukan koalisi. Proses ini saling berkaitan dan menjadi ruang utama untuk melihat bagaimana kekuasaan berpindah, bertemu, atau berbenturan. Ketiga mekanisme tersebut menegaskan bahwa kekuasaan bukan benda statis, tetapi proses dinamis yang terus berubah sesuai konteks, waktu, dan aktor yang terlibat.

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan di lingkungan anggota dewan merupakan hasil interaksi antara struktur resmi, relasi informal, dan dinamika politik yang melibatkan berbagai aktor. Kombinasi ketiganya menentukan kuat atau lemahnya posisi anggota dalam menentukan arah kebijakan. Kajian literatur yang digunakan memperkuat bahwa distribusi kekuasaan bukan hanya fenomena politik, tetapi juga fenomena sosial, kultural, dan organisasi. Hal ini memberikan pemahaman lebih luas mengenai bagaimana keputusan politik terbentuk dan bagaimana kualitas keputusan tersebut dapat ditingkatkan

## **Simpulan**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan di lingkungan anggota dewan terbentuk dari perpaduan antara struktur formal lembaga dan hubungan informal antaraktor politik. Kekuasaan tidak pernah tersebar secara merata. Ia muncul melalui mekanisme pembentukan agenda, negosiasi kepentingan, dan pembentukan koalisi, yang semuanya dipengaruhi oleh posisi jabatan, jaringan politik, akses informasi, serta tekanan dari kelompok pengaruh. Interaksi berbagai faktor ini menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan politik merupakan proses dinamis yang tidak hanya ditentukan oleh aturan resmi, tetapi juga oleh strategi individu dan kelompok.

Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas keputusan politik sangat bergantung pada keseimbangan distribusi kekuasaan dan integritas aktor yang terlibat. Ketika distribusi kekuasaan terlalu timpang, risiko dominasi berlebihan dan penurunan kualitas kebijakan menjadi lebih besar. Karena itu, pemahaman mengenai pola distribusi kekuasaan membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga legislatif.

## Saran

Penelitian lanjutan dapat mengkaji distribusi kekuasaan melalui pendekatan empiris, seperti studi kasus pada lembaga legislatif daerah atau nasional. Pendekatan lapangan akan memperkaya pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan bekerja dalam praktik, terutama terkait pola interaksi antarfraksi, proses negosiasi informal, dan dinamika hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Selain itu, penelitian berikutnya dapat membahas pengaruh gaya kepemimpinan tertentu terhadap pemerataan kekuasaan dalam lembaga politik.

Dalam praktik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki mekanisme kerja dewan. Beberapa langkah yang dapat diterapkan meliputi peningkatan transparansi proses pembentukan agenda, penyusunan aturan negosiasi yang lebih jelas, serta penguatan etika politik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan rekomendasi ini diharapkan membantu meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

## Referensi

- Ahkami, N., Maesaroh, S., & Asy'ari, H. (2025). Peran politik, kekuasaan, dan manajemen konflik dalam manajemen pendidikan. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 258–268.
- Alim, M. S. (2024). *Ilmu politik & kebijakan publik*. Mega Press Nusantara.
- Andriyani, F., Fitriani, N. A., & Ledo, R. (2025). Peran kekuasaan dan politik dalam meningkatkan kinerja. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(3), 136–141.
- Carayannis, E.G. (2018). Composite innovation metrics: MCDA and the Quadruple Innovation Helix framework. *Technological Forecasting and Social Change*, 131, 4-17, ISSN 0040-1625, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.008>
- Deni, H. A., et al. (2024). *Pengantar ilmu politik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Donaghy, T.Q. (2023). Fossil fuel racism in the United States: How phasing out coal, oil, and gas can protect communities. *Energy Research and Social Science*, 100, ISSN 2214-6296, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103104>
- Donkin, A. (2018). Global action on the social determinants of health. *BMJ Global Health*, 3, ISSN 2059-7908, <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000603>
- El-Khozondar, H.J. (2023). Standalone hybrid PV/wind/diesel-electric generator system for a COVID-19 quarantine center. *Environmental Progress and Sustainable Energy*, 42(3), ISSN 1944-7442, <https://doi.org/10.1002/ep.14049>

- Hegele, Y. (2021). Federalism and the management of the COVID-19 crisis: centralisation, decentralisation and (non-)coordination. *West European Politics*, 44(5), 1052-1076, ISSN 0140-2382, <https://doi.org/10.1080/01402382.2021.1873529>
- Hodson, D. (2020). Going Beyond STS Education: Building a Curriculum for Sociopolitical Activism. *Canadian Journal of Science Mathematics and Technology Education*, 20(4), 592-622, ISSN 1492-6156, <https://doi.org/10.1007/s42330-020-00114-6>
- Ioannou, A. (2017). Risk-based methods for sustainable energy system planning: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 74, 602-615, ISSN 1364-0321, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.02.082>
- Mortreux, C. (2018). Political economy of planned relocation: A model of action and inaction in government responses. *Global Environmental Change*, 50, 123-132, ISSN 0959-3780, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.03.008>
- Nesbitt, L. (2018). The dimensions of urban green equity: A framework for analysis. *Urban Forestry and Urban Greening*, 34, 240-248, ISSN 1618-8667, <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.07.009>
- Nurdiarti, R., & Nastain, M. (2021). Etika dan tanggung jawab sosial politik anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam implementasi kebijakan publik. *Ettisal: Jurnal Komunikasi*, 6(1), 99-113.
- Savirani, A., et al. (2025). Pengantar kajian kekuasaan. UGM Press.
- Sifat, M.M.H. (2023). Towards electric digital twin grid: Technology and framework review. *Energy and AI*, 11, ISSN 2666-5468, <https://doi.org/10.1016/j.egyai.2022.100213>
- Sinaga, H. M. (2024). Analisis peran kelompok pengaruh dalam pengambilan keputusan politik. *Tugas Mahasiswa FISIPOL*, 1(1).
- Sparkes, S.P. (2019). Political Economy Analysis for Health Financing Reform. *Health Systems and Reform*, 5(3), 183-194, ISSN 2328-8604, <https://doi.org/10.1080/23288604.2019.1633874>
- Suwito, E. P. (2013). Hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Widya Karya.
- Swyngedouw, E. (2018). "... And not a single injustice remains": Hydro- territorial colonization and techno- political transformations in Spain. *Water Justice*, 115-133, <https://doi.org/10.1017/9781316831847.008>
- Tarigan, R. S. (2024). Konstitusi dan kekuasaan: Studi kasus dalam hukum tata negara. Ruang Karya Bersama.

- 
- Trotter, P.A. (2017). Electricity planning and implementation in sub-Saharan Africa: A systematic review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 74, 1189-1209, ISSN 1364-0321, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.001>
- Wathoni, S. (2024). Implementasi kepemimpinan transformasional dalam sistem kolektif kolegal. *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana*, 6(2), 149–161.